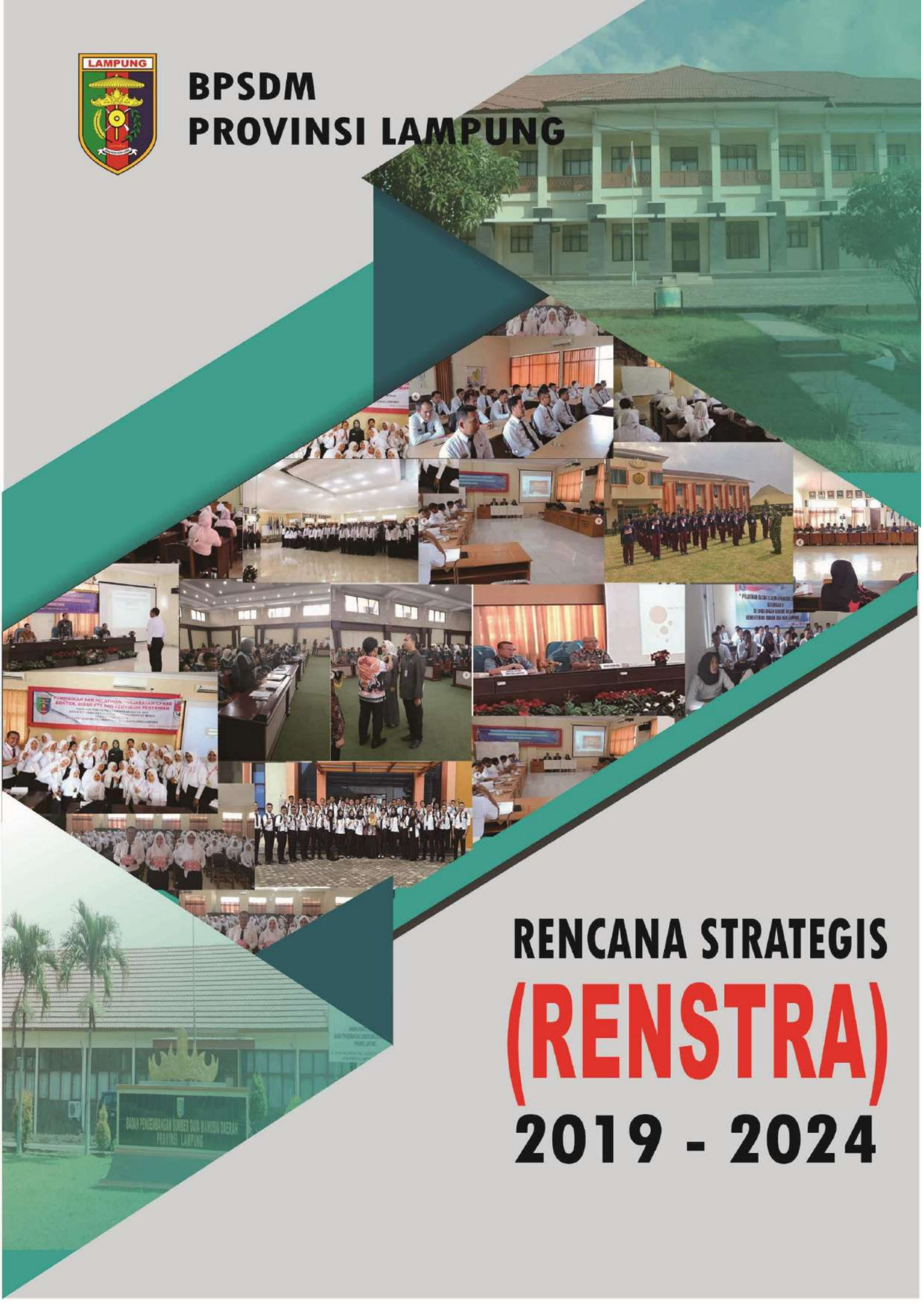




BPSDM PROVINSI LAMPUNG



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2019 - 2024

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim,

Puji syukur Alhamdulillah Rabbil 'Alamin, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung atas izin dan rahmat dari Allah SWT telah dapat menyelesaikan Rencana Strategis Tahun 2020–2024 dengan tepat pada waktunya. Rencana Startegis merupakan perencanaan 5 (lima) tahun kedepan yang berisikan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, Program dan Kegiatan, serta target kinerja yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung. Rencana Strategis ini disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Strategis yang disusun bertujuan untuk menentukan arah dan kebijakan pembangunan sumberdaya aparatur melalui pendidikan dan pelatihan yang sesuai dengan pola dasar pembangunan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung. Sebagaimana diketahui bahwa kebijakan pengembangan sumberdaya Aparatur disektor pendidikan dan pelatihan telah mengalami perubahan, saat ini

sasaran pengembangan kompetensi mengalami perubahan, tidak hanya berdimensi *knowledge, skill dan attitude*, namun dikaitkan juga dengan posisi ASN sebagai sebuah profesi, bukan lagi ASN sebagai sebuah Pekerjaan. Artinya, setiap ASN haruslah profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, baik sebagai pelayan publik, pelaksana kebijakan publik dan perekat pemersatu bangsa. Untuk memenuhi standar kompetensi dan profesionalisme ASN, maka pengembangan kompetensi ASN adalah hak, minimal 20 Jam Pembelajaran 1 tahun sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah nomor 11 tahun 2017.

Akhirnya, semoga Rencana Strategis yang telah disusun ini mendapat dukungan dari semua pihak dan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam menyusun program dan kegiatan tahun demi tahun serta memberi manfaat bagi pembangunan di Provinsi Lampung. Saran dan kritik yang disampaikan dari Bapak/Ibu/Saudara dalam kerangka perbaikan dan penyempurnaan dokumen ini sangat Kami nantikan serta masukan yang diberikan akan Kami akomodir secara proporsional. Terimakasih.

Hajimena,

2019

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**



HI. KHERLANI, SE, MM

Pembina Utama

NIP. 19620504 198103 1004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iv
I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Dasar Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	4
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
II. GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI LAMPUNG	
2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi BPSDM Provinsi Lampung	8
2.2. Sumber Daya BPSDM Provinsi Lampung.....	17
2.3. Kinerja Pelayanan BPSDM Provinsi Lampung Tahun 2016.....	20
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPSDM Provinsi Lampung	42
III. PERMASALAHAN DAN ISU PERANGKAT DAERAH	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan BPSDM Provinsi Lampung	43
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	44
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota	47
3.4. Penentuan Isu-isu Strategis	49
IV. TUJUAN DAN SASARAN	
4.1. Tujuan dan Sasaran BPSDM Provinsi Lampung.....	51
V. STRATEGI DAN KEBIJAKAN	54
VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	55
VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.....	60
VIII. PENUTUP.....	62

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung bertugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan fungsi penunjang dalam bidang pengembangan kompetensi aparatur melalui pendidikan dan pelatihan. Tidak hanya pelaksanaan pendidikan dan pelatihan saja, namun mutu penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan tersebut juga sangat penting dijalankan agar tercipta SDM aparatur yang profesional. Hal ini sejalan dengan komitmen Pemerintah Provinsi Lampung yang tertuang dalam RPJMD 2020-2024 yaitu membenahi dan meningkatkan kualitas birokrasi Pemerintah Daerah melalui manajemen Pegawai Negeri Sipil dalam upaya mewujudkan ASN yang profesional dalam pembangunan dan pelayanan publik, guna melaksanakan Misi 2: Mewujudkan “*good governance*” untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.

Manajemen Pegawai Negeri Sipil, tidak hanya berkutat pada manajemen karier PNS, pengembangan dan pola karier, mutasi dan promosi namun juga pengembangan kompetensi aparatur. Kebutuhan pengembangan kompetensi aparatur saat ini semakin penting dan mendesak dilakukan dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat, selain itu penyelenggaraan pemerintahan daerah yang semakin berdinamika, perubahan kebijakan dan paradigma pemerintahan, serta globalisasi, menuntut sumber daya manusia yang profesional. Dengan kapabilitas aparat yang kurang kompeten tentunya tidak akan menjadi daya dorong bagi terciptanya peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan

publik di Provinsi Lampung. Untuk itu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung harus mampu memanfaatkan dan mengelola potensi sumber daya aparatur seoptimal mungkin dalam rangka mencapai tujuan pembangunan yang hakiki yaitu peningkatan kemampuan dan kompetensi aparatur, sebagai agen perubahan dalam era Reformasi Birokrasi. Upaya pemenuhan kebutuhan kompetensi sumber daya aparatur tersebut dapat dicapai dengan cara tata kelola diklat serta perbaikan sarana dan prasarana diklat.

Perencanaan pembangunan jangka panjang Pemerintah Provinsi Lampung yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005 – 2025, dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung yang saat ini merupakan RPJMD Keempat (2020-2024). RPJMD tersebut secara rinci/operasional dijabarkan dalam suatu Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Renstra OPD memuat uraian dan gambaran kondisi yang akan dicapai berupa tujuan dan sasaran organisasi dan cara/metode untuk mencapainya secara efektif dan efisien melalui strategi, kebijakan, program dan kegiatan yang ditetapkan.

Dalam rangka melaksanakan pembangunan di bidang pengembangan kompetensi, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung dituntut mampu, aktif, tanggap dan handal dalam pelaksanaan pembangunan di bidang pengembangan kompetensi khususnya dalam pengelolaan peningkatan kemampuan sumber daya aparatur di Provinsi Lampung pada masa 5 (lima) tahun mendatang yang dituangkan dalam **Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020-2024** yang merupakan dokumen perencanaan yang berisi: tujuan,

target, sasaran, kebijakan, strategi, program dan kegiatan serta target kinerja yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung selama lima tahun (2020-2024) dan menjadi acuan dan arahan bagi jajaran pejabat di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan periode 2020-2024 secara menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergi baik di dalam maupun antar sektor terkait.

1.2. DASAR HUKUM

Sebagai landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020-2024, adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
- d. Peraturan Daerah Provinsi Lampung nomor 13 tahun 2019 tanggal 25 oktober 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2019 – 2024;
- e. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;

- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Sertatata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- g. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diklatpim Tingkat III;
- h. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diklatpim Tingkat IV;
- i. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diklat Prajabatan Gol III;
- j. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diklat Prajabatan Gol I dan II;
- k. Peraturan Gubernur Lampung nomor 92 Tahun 2016 tentang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 4 Tahun 2018

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung adalah untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan fungsi penunjang untuk mewujudkan Visi dan Misi Daerah yang telah disepakati dalam kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

1.3.2. Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020-2024, bertujuan :

- a. Menjabarkan strategi yang akan dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung untuk mewujudkan tujuan dan sasaran daerah di bidang urusan pemerintahan fungsi penunjang.
- b. Menjadi acuan kerja resmi bagi BPSDM Provinsi Lampung serta para pihak terkait dalam upaya pembangunan bidang urusan pemerintahan fungsi penunjang.
- c. Menjadi acuan resmi untuk penilaian kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penyusunan Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

I. Pendahuluan

Bab ini memuat tentang latar belakang penyusunan Rencana Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020-2024, Landasan Hukum

Penyusunan, Maksud dan Tujuan Penyusunan, serta Sistematika Penyusunan.

II. Gambaran Pelayanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, kondisi sumber daya yang dimiliki oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi.

III. Permasalahan dan Isu Strategis Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung

Bab ini mengemukakan permasalahan pelayanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah terpilih, telaah Renstra Kementerian/Lembaga, telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Penentuan Isu-isu Strategis.

IV. Tujuan dan Sasaran

Bab ini memaparkan Tujuan dan Sasaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung

yang menjadi orientasi utama dalam penyusunan dan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Lampung Tahun 2020-2024.

V. Strategi dan Kebijakan

Bab ini menyajikan strategi dan kebijakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung dalam lima tahun mendatang, sebagai acuan dalam perumusan program dan kegiatan pembangunan dalam mewujudkan visi dan misi Provinsi Lampung: Rakyat Lampung Berjaya (aman, berbudaya, maju dan berdayasaing, sejahtera).

VI. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung

Bab ini mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung sampai dengan Tahun 2024.

VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Bab ini menguraikan tentang kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

VIII. Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan harapan-harapan dari Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung.

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI LAMPUNG

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Lampung

2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi

A. Tugas Pokok dan Fungsi BPSDMD Provinsi Lampung

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017, dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 4 Tahun 2018, BPSDM Provinsi Lampung mempunyai tugas pokok ***"Melaksanakan Pengembangan sumber daya manusia aparatur dan non aparatur guna mendukung target pembangunan daerah di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku"***.

Sedangkan untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana tersebut di atas, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program pengembangan sumber daya manusia provinsi;
- b. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi di lingkungan pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota;
- c. Penyelenggaraan sertifikasi kompetensi di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia aparatur di provinsi dan kabupaten/kota;
- d1. Pelaksanaan pengembangan kompetensi bagi Sumber Daya Manusia non aparatur guna mendukung pencapaian target pembangunan daerah;
- e. Pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

B. Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDM) Provinsi Lampung dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang membawahi 1 (satu) Sekretariat dan 4 (empat) bidang.

Tugas pokok jabatan struktural Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung sebagaimana tertuang pada Peraturan Gubernur Lampung Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tatakerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 4 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

➤ **Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung**

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan sumber daya manusia aparatur dan non aparatur guna mendukung target pembangunan daerah di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Kepala Badan mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis, rencana, dan program serta penetapan standar/pedoman;
 - b. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi;
 - c. Penyelenggaraan sertifikasi kompetensi;
 - d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia aparatur;
 - d1. Pelaksanaan pengembangan kompetensi bagi Sumber Daya Manusia non aparatur guna mendukung target pembangunan daerah;
 - e. Pelaksanaan administrasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi;
 - f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.

➤ **Sekretariat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung**

- (1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah, serta fasilitasi Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten/Kota khususnya Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur.

- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, data, pelaporan program dan anggaran pengembangan sumber daya manusia aparatur provinsi;
 - b. Pelaksanaan anggaran, perbendaharaan keuangan, serta pelaporan keuangan dan aset;
 - c. Pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, keamanan dalam, perlengkapan, pengelolaan aset, dan dokumentasi;
 - d. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja aparatur sipil negara; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

➤ **Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti**

- (1) Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana, pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan kompetensi teknis Inti.
- (2) Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Inti mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis dan rencana pengembangan kompetensi teknis inti;
- b. Penyusunan standar perangkat pembelajaran pemerintahan dalam negeri kompetensi inti bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren dan perangkat daerah penunjang;
- c. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi inti bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren dan perangkat daerah penunjang;
- d. Pembinaan, pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan kompetensi inti bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan pemerintahan konkuren dan perangkat daerah penunjang;
- d1. Pelaksanaan pengembangan kompetensi bagi Sumber Daya Manusia non aparatur guna mendukung target pembangunan daerah; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

➤ **Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional**

(1) Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana, pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang

pengembangan kompetensi umum dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggara urusan konkuren, dan penyelenggara urusan pemerintahan umum, serta jabatan fungsional.

- (2) Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan Kompetensi Teknis Umum dan Fungsional mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan kebijakan teknis dan rencana pengembangan kompetensi teknis umum, pilihan, dan urusan pemerintahan umum bagi jabatan administrasi, serta jabatan fungsional;
 - b. Penyusunan standar perangkat pembelajaran pemerintahan dalam negeri kompetensi umum, pilihan, urusan pemerintahan umum bagi jabatan administrasi, dan jabatan fungsional;
 - c. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi umum, pilihan, serta urusan pemerintahan umum bagi jabatan administrasi dan jabatan fungsional;
 - c1. Pelaksanaan pengembangan kompetensi bagi Sumber Daya Manusia non aparatur guna mendukung target pembangunan daerah; dan
 - d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

➤ **Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial**

- (1) Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, rencana, pelaksanaan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan,

evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan kompetensi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, kepemimpinan, dan prajabatan.

(2) Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Bidang Pengembangan Kompetensi Manajerial mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis dan rencana pengembangan kompetensi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, kepemimpinan, dan prajabatan;
- b. Penyusunan standar perangkat pembelajaran pemerintahan dalam negeri bagi pimpinan daerah dan jabatan pimpinan;
- c. Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah dan jabatan pimpinan tinggi, kepemimpinan, dan prajabatan;
- d. Pembinaan, pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pengembangan kompetensi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, kepemimpinan, dan prajabatan;
- d1. Pelaksanaan pengembangan kompetensi bagi Sumber Daya Manusia non aparatur guna mendukung target pembangunan daerah; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

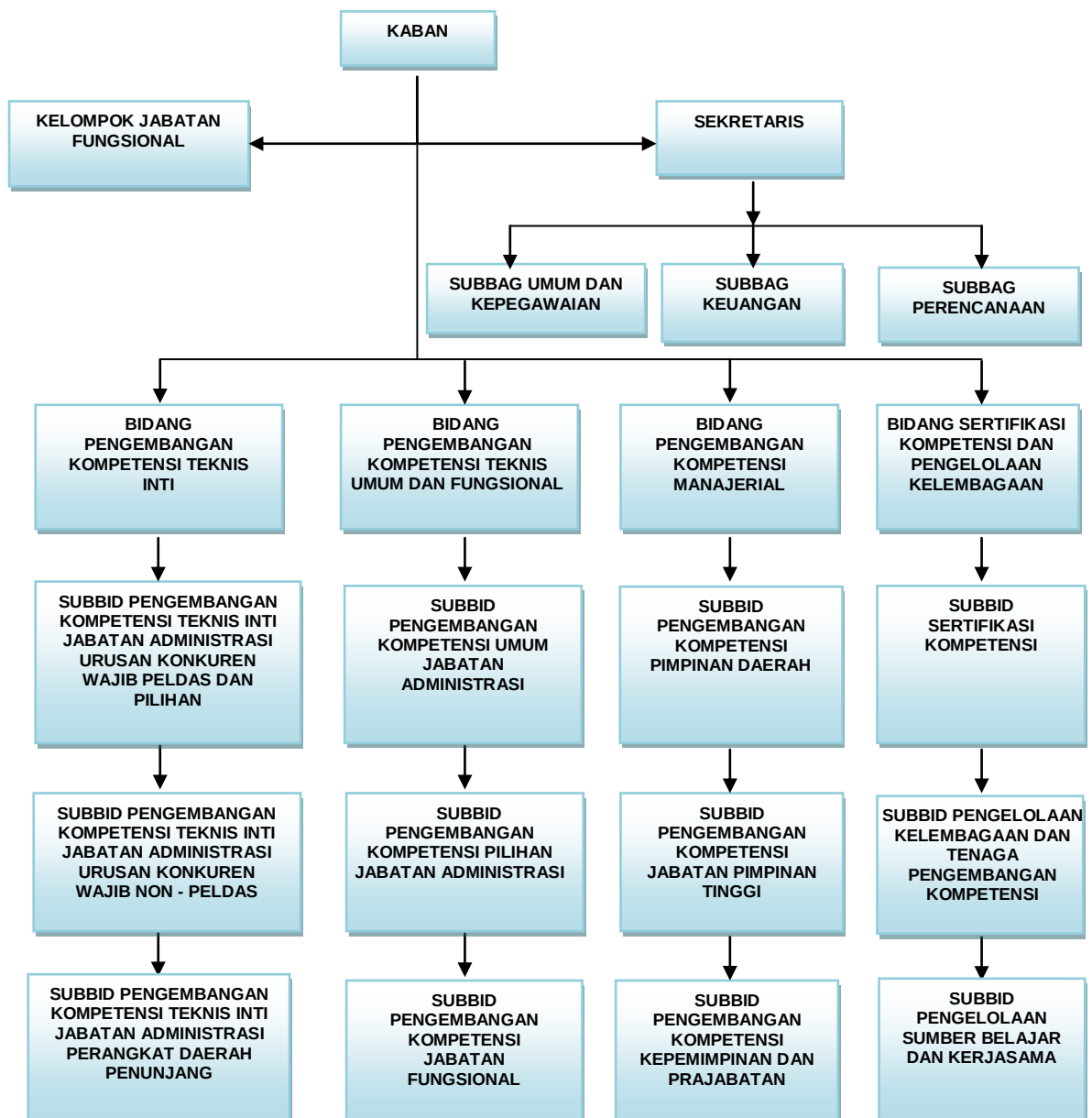
➤ **Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan**

- (1) Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sertifikasi kompetensi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, kelembagaan, tenaga pengembang kompetensi, sumber belajar, dan kerjasama antara lembaga
- (2) Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Sertifikasi Kompetensi dan Pengelolaan Kelembagaan mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan kebijakan teknis dan rencana sertifikasi kompetensi, pengelolaan kelembagaan, tenaga pengembang kompetensi, sumber belajar, dan kerjasama;
 - b. Pengelolaan lembaga sertifikasi penyelenggara pemerintahan dalam negeri provinsi;
 - c. Pelaksanaan sertifikasi kompetensi di lingkungan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota;
 - d. Pengelolaan kelembagaan, tenaga pengembang kompetensi, dan sumber belajar;
 - e. Pelaksanaan kerjasama antar lembaga, pendidikan formal, dan pendidikan kepamongprajaan;
 - f. Pembinaan, pengkoordinasian, fasilitasi, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan sertifikasi, pengelolaan kelembagaan dan tenaga pengembang kompetensi, pengelolaan sumber belajar, dan kerjasama; dan

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

2.1.2. Bagan dan Struktur Organisasi

Bagan struktur organisasi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:



2.2. Sumber Daya Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung

2.2.1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 100 orang yang terdiri dari 88 orang berstatus PNS, dan 12 orang merupakan tenaga PTHL, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1 SDM Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung Berdasarkan Jenjang Pendidikan

	S3	S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	Jumlah
PNS	-	31	24	2	12	-	3	72
WI	-	16		-	-	-	-	16
CPNS	-	-	-	-	-	-	-	-
PTHL	-	-	3	1	6	-	2	12
Jumlah	-	47	27	3	18	-	5	100

Tabel 2.2 SDM Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung Berdasarkan Golongan

Golongan IV/e : 5 orang	Golongan IV/d : 4 orang
Golongan IV/c : 4 orang	Golongan IV/b : 6 orang
Golongan IV/a : 19 orang	Golongan III/d : 11 orang
Golongan III/c : 12 orang	Golongan III/b : 8 orang
Golongan III/a : 8 orang	Golongan II/d : 1 orang
Golongan II/c : 5 orang	Golongan II/b : 2 orang
Golongan II/a : - orang	Golongan I/d : - orang
Golongan I/c : - orang	Golongan I/b : 3 orang
Golongan I/a : - orang	

Tabel 2.3 SDM Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung Berdasarkan Jabatan Fungsional Widyaiswara

Golongan IV/e : 4 orang	Golongan IV/d : 4 orang
Golongan IV/c : 3 orang	Golongan IV/b : 2 orang
Golongan IV/a : 2 orang	Golongan III/d : 1 orang

2.2.2. Sarana, Prasarana dan Sumber Anggaran

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Propinsi Lampung adalah sebagai berikut :

1. Tanah dan Bangunan, yang terdiri dari :
 - Luas Tanah = 8,6524 Ha
 - Luas Bangunan = 5.548 M²
 - Ruang Belajar, 2 Unit
 - Ruang Belajar Gunung Seminung terdiri dari 6 kelas
 - Ruang Belajar Gunung Way Umpu terdiri dari 1 kelas
 - Aula Gunung Krakatau dengan kapasitas ± 500 orang
 - Gedung Asrama, 3 unit
 - Asrama Gunung Pesagi terdiri dari 42 kamar dengan daya tampung 3 orang per kamar
 - Asrama Gunung Tanggang terdiri dari 16 kamar dengan daya tampung 2 orang per kamar
 - Asrama Gunung Betung terdiri dari 9 kamar dengan daya tampung 2 orang per kamar
 - Asrama Gunung Rajabasa (VIP) terdiri dari 15 kamar dengan daya tampung 2 orang per kamar
 - Ruang Perkantoran, 4 unit
 - Ruang Makan, 2 unit
 - Ruang makan VIP kapsitas 80 orang

- Ruang makan kapasitas 150 orang
- Laboratorium Komputer, 1 unit
- Laboratorium Bahasa, 1 unit
- Ruang Perpustakaan, 1 unit
- Ruang Widyaiswara, 1 unit
- Ruang Foto Copy, 1 unit
- Ruang Musholla, 1 unit
- Ruang Kamar Mandi/WC, 91 unit
- Ruang Gudang, 6 unit
- Ruang Kebugaran, 1 unit
- Lapangan Voli, 1 unit
- Lapangan Bulu Tangkis, 1 unit

2. Perangkat Penunjang lainnya :

- Lemari Kantor, 21 buah
- Lemari peserta, 82 unit
- Tempat tidur, 200 unit
- Wireles, 12 unit
- Sound System, 3 unit
- Meja Belajar, 450 unit
- Komputer, 15 unit
- Papan whiteboard, 11 unit
- Laptop, 12 unit
- LCD, 8 unit
- Genset 30.000 watt, 1 unit
- Genset 10.000 watt, 1 unit
- Kursi makan, 120 buah
- Meja Makan, 20 buah
- Filling kabinet, 15 buah
- Meja Kerja, 80 buah
- Organ, 2 unit

3. Kendaraan Dinas/Operasional :

- Kendaraan Roda Empat (mobil), 3 unit
- Kendaraan Roda Dua (Motor), 2 unit

Anggaran yang digunakan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung yang dijabarkan ke dalam program kerja bersumber dari:

- a) Dana APBD Provinsi Lampung.
- b) Dana APBD Kabupaten/Kota yang disetorkan ke Kas Pemerintah Daerah Provinsi Lampung untuk Diklat Swadana yang peserta berasal dari Kabupaten/Kota.

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung Tahun 2015-2019

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDM) Provinsi Lampung telah melakukan beberapa Program dan Kegiatan untuk mencapai kinerja pelayanan perangkat daerah. Adapun hasil capaian tersebut dari Tahun 2015 - 2018 dapat dilihat sebagaimana berikut Tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung (BPSDM) Provinsi Lampung

No.	Indikator Kinerja Perangkat Daerah	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian Pada Tahun ke-			
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
1.	Persentase aparatur yang lulus pengembangan kompetensi dengan ketentuan predikat minimal memuaskan dan hasil post test minimal 70	70%	75%	80%			74%	86,20%	87,25%		104,63	115,33	109,06	
2.	Jumlah aparatur yang lulus uji kompetensi	-	240	124			-	240	124					
3.	Kualifikasi Akreditasi Lembaga Diklat	B	B	B			B	B	B		100	100	100	
INDIKATOR KINERJA (HASIL EVALUASI SAKIP dan PENAJAMAN IKU)														
1.	Persentase aparatur yang lulus pengembangan kompetensi dengan ketentuan Predikat memuaskan				85%	90%				85,26%				100,31
2.	Persentase penilaian performance tenaga pengajar dan penyelenggara pengembangan Kompetensi minimal baik				90%	100%				90%				100

Berdasarkan tabel 2.4 di atas dapat dilihat bahwa indikator kinerja perangkat daerah telah tercapai sesuai dengan yang ditargetkan. Pada tahun 2015, persentase peserta diklat yang memperoleh sertifikat diklat dengan kualifikasi predikat minimal memuaskan dan hasil post test minimal 70 sebesar **74%** meningkat menjadi **85,26%** di tahun 2018, hal ini menunjukkan adanya peningkatan dari sisi kualitas alumni diklat dari tahun ke tahun. Untuk kualifikasi akreditasi lembaga diklat, nilai yang didapat hingga tahun 2018 adalah B, secara umum akreditasi B dapat dikatakan menunjukkan kondisi yang cukup baik walaupun demikian status akreditasi memberikan kontribusi terhadap kinerja lembaga diklat. Apalagi akreditasi tidak saja bertujuan untuk memberikan penilaian kelayakan lembaga diklat dalam menyelenggarakan suatu program diklat, akan tetapi juga diharapkan dapat memicu lembaga diklat untuk meningkatkan kinerjanya.

Secara rinci jumlah aparatur yang telah terlayani diklat di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDM) Provinsi Lampung dalam kurun 4 (empat) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut ini:

Tabel 2.5 Data Aparatur Yang Lulus Diklat Tahun 2015 - 2018

No.	Jenis Diklat	Tahun								Jumlah Lulusan SDM aparatur provinsi (Orang)
		2015		2016		2017		2018		
		Prov	Kab/ Kota	Prov	Kab/ Kota	Prov	Kab/ Kota	Prov	Kab/ Kota	
1.	Diklat Kepemimpinan dan Prajabatan	135	1.533	110	1.007	80	80	74	430	399
2.	Pengembangan Kompetensi Teknis Inti	210	-	30	-	120	-	60	-	180
3.	Pengembangan Kompetensi Teknis Umum Fungsional	30	-	151	-	214	-	60	-	695
	Total	375	1.533	291	1.007	414	80	194	430	1274

Sumber : BPSDM Provinsi Lampung tahun 2019

Jika ditinjau dari jumlah lulusan diklat, maka didapat data bahwa hingga tahun 2018, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDM) Provinsi Lampung telah meluluskan sebanyak **1.274** orang aparatur Provinsi Lampung dari total **16.646** orang pegawai pemerintah Provinsi Lampung. Dari segi kuantitas terlihat bahwa **7,65%** aparatur telah bersertifikasi diklat, namun data tersebut belum bisa menunjukkan aparatur mana saja yang sudah terlayani dan yang belum pernah mengikuti diklat sama sekali. Berdasarkan data tersebut, terdapat **92,35%** aparatur atau sebesar **15.372** orang aparatur yang belum terlayani diklat/pengembangan kompetensi baik pengembangan kompetensi kepemimpinan dan prajabatan, teknis inti maupun teknis umum dan fungsional. oleh sebab itu kelompok aparatur tersebut menjadi prioritas sasaran kinerja pelayanan BPSDM Provinsi Lampung selama 5 (lima) tahun kedepan. Untuk kegiatan pengembangan kompetensi kepemimpinan dan prajabatan, berdasarkan data yang berhasil dihimpun terdapat beberapa aparatur yang membutuhkan diklat kepemimpinan sebagaimana terlihat pada tabel 2.6 berikut:

Tabel 2.6 Data Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Manajerial Aparatur Provinsi Lampung s.d 2019

Uraian	Jabatan			Jumlah
	Pejabat Tinggi Pratama (Ess II.a)	Pejabat Administrator (Ess III.a)	Pejabat Pelaksana (Ess IV.a)	
Jumlah Pejabat Esselon	46	321	850	1.217
Belum Diklatpim II	13			13
Belum Diklatpim III		33		33
Belum Diklatpim IV			362	362

Sumber : BKD Provinsi Lampung tahun 2019

Selanjutnya data kebutuhan pengembangan kompetensi/diklat sampai dengan tahun 2019 untuk pengembangan kompetensi teknis inti serta teknis umum dan fungsional dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.7 Data Kebutuhan Pengembangan Kompetensi Teknis Inti, Teknis Umum dan Fungsional Provinsi Lampung s.d 2019

KEBUTUHAN/NAMA DIKLAT	SASARAN	JUMLAH PESERTA	TARGET PELAKSANAAN DIKLAT	SUMBER DATA
Diklat Revolusi Mental	Pejabat Struktural Ess III dan IV	Eselon IV : 850 Orang Eselon III : 321 Orang		Bkd
Diklat Pengadaan Barang/Jasa	SDM Aparatur Pemprov Lampung	220 orang (5 Orang dalam satu OPD)		OPD Pemprov Lampung
Diklat Pembentukan P2UPD	jabatan fungsional P2UPD	124 Orang		Inspektorat
Diklat Teknis Penyuluh Kehutanan	Penyuluh Kehutanan	153 Orang		Dinas Kehutanan
Diklat Polisi Kehutanan	Polisi Kehutanan	170 Orang		Dinas Kehutanan
Diklat Peningkatan Mutu Guru SMA	Guru SMA di Provinsi Lampung	300 Orang		Dinas Pendidikan
Diklat Penyuluh Pertanian	Penyuluh pertanian	450 Orang		Dinas Pertanian
Diklat SDM Sadar Kepariwisata	Kelompok Sadar Wisata	190 Pokdarwis	2020 - 2024	Dinas Pariwisata
Diklat Perpustakaan E-Sekolah	pengelola perpustakaan SMA/ SMK	- 238 SMA x 1 orang - 254 SMK x 1 orang	2020 - 2022	Dinas Pendidikan
Diklat Penata Usahaan Aset Sekolah	-Pengelola Aset Sekolah	- 238 SMA x 1 orang - 254 SMK x 1 orang	2019 - 2024	Dinas Pendidikan
Diklat Pengelolaan Keuangan Sekolah	-Pengelola Keuangan Sekolah	- 238 SMA x 1 orang - 254 SMK x 1 orang	2019 - 2022	Dinas Pendidikan
Diklat Sistem Manajemen Puskesmas	SDM Aparatur Dinas Kesehatan Pemerintah Kab/Kota	299 puskesmas dilingkungan Pemkab/Kota	2021-2024	Dinas Kesehatan
Diklat Strategi Relokasi Pasar dan PKL	PNS Satpol PP dilingkungan Pemprov & Kab/Kota	150 Orang	2021-2024	Kantor Sat Pol PP

KEBUTUHAN/NAMA DIKLAT	SASARAN	JUMLAH PESERTA	TARGET PELAKSANAAN DIKLAT	SUMBER DATA
Diklat Manajemen Logistik Bencana Alam	SDM Aparatur Dinas BPBD Pemerintah Provinsi & Kab/Kota	150 Orang	2021-2024	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Diklat penyusunan RENSTRA	Pejabat Pengawas dan Pelaksana Pemprov Lampung	102 SDM Aparatur (51 OPD X 2 Orang)	2019 - 2022	OPD di lingkungan Pemprov Lampung
Diklat perencanaan dan penganggaran (integrasi e-planning & e-budgeting)	Pejabat Pengawas dan Pelaksana Pemprov Lampung	102 SDM Aparatur (51 OPD X 2 Orang)	2019 - 2022	OPD di lingkungan Pemprov Lampung
Diklat perencanaan , monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Renstra dan Renja	Pejabat Pengawas dan Pelaksana Pemprov Lampung	102 SDM Aparatur (51 OPD X 2 Orang)	2019 - 2022	OPD di lingkungan Pemprov Lampung
Diklat Keuangan	2 ASN terdiri Pejabat Pengawas dan Pelaksana	102 SDM Aparatur (51 OPD X 2 Orang)	2020 s.d 2021	OPD di lingkungan Pemprov Lampung
Diklat Pengelolaan Aset	2 ASN terdiri Pejabat Pengawas dan Pelaksana	102 SDM Aparatur (51 OPD X 2 Orang)	2020 s.d 2021	OPD di lingkungan Pemprov Lampung
Diklat Perpajakan	2 ASN terdiri Pejabat Pengawas dan Pelaksana	102 SDM Aparatur (51 OPD X 2 Orang)	2020 s.d 2021	OPD di lingkungan Pemprov Lampung
Diklat Manajemen Kepegawaian	2 ASN terdiri Pejabat Pengawas dan Pelaksana	102 SDM Aparatur (51 OPD X 2 Orang)	2020 s.d 2021	OPD di lingkungan Pemprov Lampung
Diklat LPPD/SAKIP	2 ASN terdiri Pejabat Pengawas dan Pelaksana	102 SDM Aparatur (51 OPD X 2 Orang)	2020 s.d 2021	OPD di lingkungan Pemprov Lampung
Diklat Manajemen Arsip Digital	2 ASN terdiri Pejabat Pengawas dan Pelaksana	102 SDM Aparatur (51 OPD X 2 Orang)	2020 s.d 2021	OPD di lingkungan Pemprov Lampung
Diklat bidang Teknologi Infomasi dan komunikasi	2 ASN terdiri Pejabat Pengawas dan Pelaksana	30 SDM Aparatur Prov. Lampung dan 30 SDM Aparatur Kab/kota	2020	Dinas Kominfo
Diklat Teknis Pengelolaan Administrasi Desa berbasis Digital	2 ASN terdiri Pejabat Pengawas dan Pelaksana	30 SDM Aparatur Prov. Lampung dan 30 SDM Aparatur Kab/kota	2020	Dinas PMD

Berdasarkan data di atas maka estimasi pelaksanaan pengembangan kompetensi aparatur selama 5 (lima) tahun dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.8 Target SDM Aparatur Provinsi Lampung yang Memiliki Sertifikat Diklat Pada Tahun 2020-2024

Program	Base Line tahun 2018 (orang)	Target Jumlah SDM Aparatur yang Memiliki Sertifikat Diklat (Orang)					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Manajerial		294	448	608	703	703	783
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Teknis Umum dan Fungsional		370	480	540	560	560	560
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Teknis Inti		150	360	360	360	360	360
Total	1274	814	1288	1508	1623	1623	1703
Persentase SDM aparatur yang memiliki sertifikat diklat = ((Akumulasi SDM aparatur yang memiliki sertifikat diklat s.d tahun berjalan/Jumlah PNS) x100%)	7,65%	12,54%	20,28%	29,34%	39,09%	48,84%	59,07%

Sumber : Bidang Teknis BPSDM Provinsi Lampung tahun 2019

Untuk tingkat capaian kapasitas manajemen diklat, beberapa kondisi yang dapat dijelaskan yaitu :

1. Aspek Fungsi Manajemen

- a. **Aspek perencanaan diklat**, dilakukan berdasarkan identifikasi kebutuhan diklat bersama seluruh OPD yang ada di Provinsi Lampung, namun belum mengarah kepada pemetaan kebutuhan diklat
- b. **Aspek pelaksanaan diklat**, sudah dilakukan sesuai dengan pedoman penyelenggaraan diklat yang berlaku baik dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, maupun kementerian/lembaga terkait.
- c. **Aspek evaluasi diklat**, untuk penyelenggaraan sudah dilakukan evaluasi pelaksanaan, walaupun sebagian besar kegiatan diklat tidak menjalankan evaluasi pasca diklat khususnya pada diklat teknis dan fungsional

2. Aspek Unsur Manajemen

- a. **SDM aparatur BPSDM Provinsi Lampung**, masih terdapat beberapa SDM yang belum mengikuti diklat ToC/MoT
- b. **Akreditasi**, saat ini akreditasi BPSDM Provinsi Lampung berkualifikasi **B**. Berdasarkan hasil evaluasi asesor akreditasi, ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan diantaranya sarana prasarana, kompetensi widyaiswara dan tenaga penyelenggara
- c. **Sarana prasarana**, BPSDM Provinsi Lampung telah berupaya memenuhi sarana prasarana sesuai standar namun masih terdapat kekurangan karena terbatasnya anggaran. Adapun kondisi sarana kediklatan dan kebutuhan pengembangannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1 Sarana Prasana Kediklatan

No.	URAIAN	RENCANA KEBUTUHAN (UNIT/BUAH/PAKET)	JUMLAH BARANG/ GEDUNG (UNIT/BUAH/PAKET)	KONDISI
A.	SARANA			
1.	Meja Belajar Bundar	-	40 Buah	BAIK
2.	Meja Belajar	-	100 Buah	BAIK
3.	Kursi Belajar	122 Buah	200 Buah	BAIK
4.	Infocus/LCD	4 Buah	10 Buah	BAIK
5.	Sound System	4 Buah	10 Buah	BAIK
6.	Wi-Fi	8 Paket	5 Paket	BAIK
7.	Teknologi Multimedia	3 Paket	-	-
B.	PRASARANA			
1.	Ruang Kelas	2 Unit	9 Unit	BAIK
2.	Ruang Diskusi	2 Unit	-	-
3.	Aula	-	1 Unit	BAIK
4.	Ruang Seminar	4 Unit	-	-
5.	Ruang Kantor	-	15 Unit	BAIK
6.	Ruang Perpustakaan	-	1 Unit	BAIK
7.	Asrama	1 Unit	4 Unit	BAIK
8.	Ruang Kebugaran/ Fitness	1 Unit	-	-
9.	Unit Kesehatan	-	1 Unit	BAIK
10.	Tempat Ibadah	-	1 Unit	BAIK
11.	Ruang Makan	-	2 Unit	BAIK
12.	Sarana rekreasi	1 Unit	-	-

- d. **Teknologi informasi (TI)**, BPSDM Provinsi Lampung belum sepenuhnya mengembangkan aplikasi kediklatan berbasis TI, selain SDM yang kurang, jaringan TI yang dimiliki belum dibangun secara memadai.

Tabel 2.7 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung (BPSDMD) Provinsi Lampung

Uraian (Program)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke--				Rata-rata Pertumbuhan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	Pagu	Realisasi
Belanja Tidak Langsung	8.573.075.500	8.529.334.750	8.899.822.000	8.399.822.000	10.847.091.176	7.791.186.146	8.482.771.206	8.174.853.923	8.070.866.146	90,88%	99,45%	89,09%	97,65%	6,84%	1,32%
Belanja Langsung	14.068.526.100	11.672.974.500	9.000.000.000	7.904.377.317	26.072.128.000	13.226.621.561	11.172.397.599	8.018.289.647	7.733.150.675	94,02%	95,71%	89,09%	97,83%	44,44%	-15,77%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.873.965.600	1.675.311.930	2.210.167.600	1.802.143.397	2.192.444.591	1.789.734.372	1.539.720.180	2.012.919.623	1.726.273.444	95,51%	91,91%	91,08%	95,79%		
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.955.000	4.056.650				5.955.000	4.017.000			100,00%	99,02%	0,00	0,00		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	523.800.000	523.800.000	588.600.000	583.800.000	745590016	453.996.072	434.054.330	563.959.726	515.761.896	86,67%	82,87%	95,81%	88,35%		
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50.696.000					50.696.000				100,00%	0,00	0,00	0,00		
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	69.000.000	323.696.000	568.536.000	430.520.000	509379892	69.000.000	323.696.000	554.886.000	425.645.000	100,00%	100,00%	97,60%	98,87%		
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	336.200.000	135.600.000	186.450.000	186.450.000	186450000	327.724.000	135.504.000	186.300.000	186.300.000	97,48%	99,93%	99,92%	99,92%		
Penyediaan Alat Tulis Kantor	35.778.000	26.483.250	53.336.700	21.025.200	26566802	35.778.000	26.483.250	38.336.700	21.025.200	100,00%	100,00%	71,88%	100,00%		
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	49.975.000	37.799.350	43.686.500	22.398.800	34316500	49.975.000	37.799.350	29.142.050	22.391.300	100,00%	100,00%	66,71%	99,97%		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	92.159.200	48.883.080	86.150.900	46.972.500	60744440	88.251.600	48.874.900	51.499.100	46.222.500	95,76%	99,98%	59,78%	98,40%		
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	47.859.000	44.447.200	57.604.800	31.132.400	53500000	47.353.000	44.276.050	39.541.700	31.128.550	98,94%	99,61%	68,64%	99,99%		

Uraian (Program)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke--				Rata-rata Pertumbuhan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	Pagu	Realisasi
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	45.366.000	31.140.700	36.698.200	28.133.897	33888816	45.366.000	31.140.700	23.196.100	28.132.500	100,00%	100,00%	63,21%	100,00%		
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	21.960.000	19.080.000	19.080.000	19.080.000	19080000	21.960.000	19.080.000	18.762.000	19.080.000	100,00%	100,00%	98,33%	100,00%		
Penyediaan Makanan dan Minuman	48.500.000	28.900.000	76.852.000	49.344.000	59580000	48.439.000	28.725.000	52.646.000	48.888.000	99,87%	99,39%	68,50%	99,08%		
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah	234.566.400	197.472.800	220.460.000	205.361.600	205140000	234.558.700	196.930.200	220.439.747	205.208.498	100,00%	99,73%	99,99%	99,93%		
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	51.951.000	70.951.000	93.909.000	93.909.000	93920000	51.778.000	70.760.000	93.865.000	93.858.000	99,67%	99,73%	99,95%	99,95%		
Pameran dan Promosi Pembangunan	150.000.000	44.622.500	116.871.500		142896125	148.704.000	0	84.301.500		99,14%	0,00%	72,13%	0,00		
Penyediaan Jasa Tim Penilai Jabatan Fungsional Provinsi Lampung	19.100.000	48.271.700				19.100.000	48.271.700			100,00%	100,00%	0,00	0,00		
Pengembangan Pengelolaan Keuangan SKPD	72.000.000	72.000.000				72.000.000	72.000.000			100,00%	100,00%	0,00	0,00		
Penyediaan Bahan Standar Kompetensi Jabatan dan Evaluasi Jabatan	19.100.000	18.107.700	61.932.000	84.016.000	21392000	19.100.000	18.107.700	56.044.000	82.632.000	100,00%	100,00%	90,49%	98,35%		
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	2.567.329.800	1.025.021.020	1.191.997.000	477.454.100	837.810.000	2.541.320.860	1.017.881.430	673.144.440	474.321.156	98,99%	99,30%	56,47%	99,34%		

Uraian (Program)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke--				Rata-rata Pertumbuhan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	Pagu	Realisasi
Pembangunan Gedung kantor	1.059.793.800	292.000.000	18.750.000			1.050.680.000	290.440.000	18.650.000		99,14%	99,47%	99,47%	0,00		
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	462.110.000	219.690.000				457.873.000	218.573.750			99,08%	99,49%	0,00	0,00		
Pengadaan Perlengkapan Gedung kantor			534.003.000	70.750.000	252140000			326.960.000	70.698.000	0,00	0,00	61,23%	99,93%		
Pengadaan Meubeleur	603.838.000	14.950.000	227.995.000	104.800.000	210000000	598.938.000	14.300.000	19.595.000	104.800.000	99,19%	95,65%	8,59%	100,00%		
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	248.369.000	162.000.000	153.200.000	110.661.600	140052000	242.498.000	161.946.250	100.160.000	110.631.600	97,64%	99,97%	65,38%	99,97%		
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	105.019.000	113.169.000	123.219.000	123.219.000	144918000	103.391.860	111.520.910	115.094.440	120.836.556	98,45%	98,54%	93,41%	98,07%		
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	70.900.000	75.000.000	99.200.000	68.023.500	90700000	70.640.000	75.000.000	73.255.000	67.355.000	99,63%	100,00%	73,85%	99,02%		
Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeleur	17.300.000	30.630.520	35.630.000			17.300.000	28.950.520	19.430.000		100,00%	94,52%	54,53%	0,00		
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor		117.581.500					117.150.000			0,00	99,63%	0,00	0,00		
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	8.050.121.000	8.039.027.000	4.525.389.000	5.112.347.000	22.567.149.967	7.521.946.234	7.794.040.900	4.429.301.484	5.081.449.905	93,44%	96,95%	97,88%	99,40%		
Pendidikan Pelatihan Formal	232.348.000	140.000.000	298.277.000	175.867.100	292079000	229.292.984	139.820.000	298.247.259	175.821.931	98,69%	99,87%	99,99%	99,97%		
Diklat Pengelolaan APBD	184.034.000					180.882.800				98,29%	0,00	0,00	0,00		

Uraian (Program)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke--				Rata-rata Pertumbuhan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	Pagu	Realisasi
Diklat Pengelolaan Barang/Aset Daerah	92.017.000					90.090.200				97,91%	0,00	0,00	0,00		
Diklat Manajemen Keprotokolan	100.000.000					90.036.050				90,04%	0,00	0,00	0,00		
Diklat Perencanaan Tata Ruang Wilayah dan Kota	201.384.000					162.893.750				80,89%	0,00	0,00	0,00		
Diklat Bendahara Untuk Pelaporan Keuangan Daerah Berbasis Akrua	301.103.000					297.844.500				98,92%	0,00	0,00	0,00		
Diklat Prajabatan Golongan I/II CPNS Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung	343.397.000	773.310.000				215.765.250	725.852.200			62,83%	93,86%	0,00	0,00		
Diklat Prajabatan Golongan III CPNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung	207.597.000	1.624.685.000				188.072.000	1.549.514.000			90,59%	95,37%	0,00	0,00		
Diklat Prajabatan Golongan III CPNS Reguler Angkatan II dan III Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung *	415.194.000					362.818.000				87,39%	0,00	0,00	0,00		
Diklat Prajabatan Golongan III CPNS Reguler Angkatan IV Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung *	207.597.000					185.296.000				89,26%	0,00	0,00	0,00		

Uraian (Program)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke--				Rata-rata Pertumbuhan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	Pagu	Realisasi
Diklat Prajabatan Golongan III CPNS Reguler Angkatan V Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung *	159.248.500					143.748.500				90,27%	0,00	0,00	0,00		
Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III K1 dan K2 Angk. III, IV, V dan VI CPNS Eks-Honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung *	312.814.000					303.386.000				96,99%	0,00	0,00	0,00		
Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III K1 dan K2 Angk. VII, VIII, IX dan X CPNS Eks-Honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung *	312.814.000					304.186.000				97,24%	0,00	0,00	0,00		
Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III K1 dan K2 Angk. XI, XII, XIII dan XIV CPNS Eks-Honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung *	312.814.000					303.986.000				97,18%	0,00	0,00	0,00		
Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III K1 dan K2 Angk. XV,	312.814.000					303.986.000				97,18%	0,00	0,00	0,00		

Uraian (Program)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke--				Rata-rata Pertumbuhan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	Pagu	Realisasi
XVI, XVII dan XVIII CPNS Eks-Honor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung *															
Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III K1 dan K2 Angk. XIX, XX, XXI dan XXII CPNS Eks-Honor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung *	312.814.000					303.986.000				97,18%	0,00	0,00	0,00		
Kegiatan Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III K1 dan K2 Angk. XXIII, XXIV, XXV dan XXVI CPNS Eks-Honor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung *	312.814.000					303.986.000				97,18%	0,00	0,00	0,00		
Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III K1 dan K2 Angk. XXVII CPNS Eks-Honor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung *	80.898.500					73.548.500				90,91%	0,00	0,00	0,00		
Diklat Kepemimpinan Tingkat III, Angkatan	774.375.000					746.581.000				96,41%	0,00	0,00	0,00		

Uraian (Program)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke--				Rata-rata Pertumbuhan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	Pagu	Realisasi
XLV di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung															
Diklat Kepemimpinan Tingkat III, Angkatan II dan III di Lingkungan Pemerintah Kab./Kota se-Provinsi Lampung *	1.770.000.000					1.657.168.700				93,63%	0,00	0,00	0,00		
Diklat Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Perencanaan SKPD	227.024.000					218.682.000				96,33%	0,00	0,00	0,00		
Diklat Prajabatan Golongan III CPNS Reguler Angkatan VI dan VII di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung	332.700.000					325.422.000				97,81%	0,00	0,00	0,00		
Diklat Prajabatan Golongan I, II dan III K1 dan K2 Angkatan XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII dan XXXIV CPNS Eks Honorer di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung	544.320.000					530.288.000				97,42%	0,00	0,00	0,00		
Diklat Teknis Bagi ASN Pemerintah Provinsi Lampung		290.970.715					290.970.715			0,00	100,00%	0,00	0,00		

Uraian (Program)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke--				Rata-rata Pertumbuhan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	Pagu	Realisasi
dan Pemerintah Kab/Kota se Provinsi Lampung															
Diklat Fungsional Bagi ASN Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kab/Kota se Provinsi Lampung		427.229.285					427.162.085			0,00	99,98%	0,00	0,00		
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung		730.000.000	607.056.000	768.260.000	783976000		693.513.000	597.910.960	765.337.000	0,00	95,00%	98,49%	99,62%		
Diklat Kepemimpinan Tingkat IV di Lingkungan Pemerintah Kab/Kota se Provinsi Lampung		719.010.000		801.420.000	1567952000		676.894.000		798.487.000	0,00	94,14%	0,00	99,63%		
Diklat Kepemimpinan Tingkat III di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung		628.392.000	667.266.000	803.460.000			620.118.000	651.610.962	781.743.074	0,00	98,68%	97,65%	97,30%		
Diklat Kepemimpinan Tingkat III di Lingkungan Pemerintah kabupaten/kota Provinsi Lampung		1.662.900.000	1.606.050.000	849.750.000	1717464000		1.643.274.900	1.560.467.736	846.471.000	0,00	98,82%	97,16%	99,61%		
Diklat Prajabatan Golongan I/II dan III CASN Eks Honorar di		1.042.530.000		776.796.400			1.026.922.000		776.796.400	0,00	98,50%	0,00	100,00%		

Uraian (Program)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke--				Rata-rata Pertumbuhan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	Pagu	Realisasi
Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Kabupaten /Kota se Provinsi Lampung															
Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Pelayanan Dasar Dan Pilihan			98.686.000		168056000			98.356.400		0,00	0,00	99,67%	0,00		
Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Non-Pelayanan Dasar			98.686.000		77103000			98.259.000		0,00	0,00	99,57%	0,00		
Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Urusan Penunjang			197.372.000	776.796.400	173944000			185.762.200	776.796.400	0,00	0,00	94,12%	100,00%		
Pengembangan Kompetensi Umum			202.300.000	79.999.200	436620000			202.299.856	79.999.200	0,00	0,00	100,00%	100,00%		
Pengembangan Kompetensi Pilihan Jabatan Administrasi			101.096.000	79.997.900	301580000			100.932.711	79.997.900	0,00	0,00	99,84%	100,00%		
Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional			648.600.000		759559967			635.454.400		0,00	0,00	97,97%	0,00		
Diklat Prajabatan Golongan III CASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan Pemerintah Kab/Kota se-					16288816000					0,00	0,00	0,00	0,00		

Uraian (Program)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke--				Rata-rata Pertumbuhan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	Pagu	Realisasi
Provinsi Lampung															
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	179.587.000	114.265.550	106.287.400	105.428.000	50.245.263	174.234.000	112.815.550	105.582.000	105.380.000	97,02%	98,73%	99,34%	99,95%		
Penyusunan Pelaporan Keuangan	65.387.000	42.391.550	61.482.400	53.560.000	8880113	65.089.000	42.061.550	61.133.000	53.560.000	99,54%	99,22%	99,43%	100,00%		
Jumlah Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar Realisasi Kinerja SKPD	85.000.000	18.980.000	44.805.000	51.868.000	7093150	81.558.000	18.980.000	44.449.000	51.820.000	95,95%	100,00%	99,21%	99,91%		
Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Per-Semester	29.200.000	52.894.000				27.587.000	51.774.000			94,48%	97,88%	0,00	0,00		
Penyusunan Renstra					34272000					0,00	0,00	0,00	0,00		
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	615.894.200	427.050.000	748.474.600	203.237.420	251.317.409	479.236.050	349.373.640	585.469.500	142.414.182	77,81%	81,81%	78,22%	70,07%		
Lembaga Sertifikasi Profesi	132.607.200	259.450.500	304.096.000	69.384.900	114890760	123.870.200	218.227.340	224.330.100	68.449.462	93,41%	84,11%	73,77%	98,65%		
Komite Penjamin Mutu Diklat	66.724.000	40.750.000	44.760.000	24.343.520	49849886	64.555.550	26.274.000	18.538.000	24.139.520	96,75%	64,48%	41,42%	99,16%		
Analisa Kebutuhan Diklat	127.230.000	57.099.500				99.357.000	50.574.300			78,09%	88,57%	0,00	0,00		
Peningkatan Kemampuan Penelitian Widyaiswara	54.333.000	35.000.000	101.960.600		35592777	29.483.000	27.794.000	45.476.400		54,26%	79,41%	44,60%	0,00		
Penerbitan Majalah/Buletin Badan Diklat Daerah Provinsi Lampung	85.000.000	34.750.000	61.470.000	29.509.000	50983986	74.632.650	26.504.000	61.065.000	28.759.000	87,80%	76,27%	99,34%	97,46%		

Uraian (Program)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke--				Rata-rata Pertumbuhan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	Pagu	Realisasi
Akreditasi	150.000.000			80.000.000		87.337.650			21.066.200	58,23%	0,00	0,00	26,33%		
Pembinaan Kediklatan, Pengelolaan Kelembagaan Dan Pengembangan Kompetensi Aparatur			236.188.000					236.060.000		0,00	0,00	99,95%	0,00		
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	294.790.500	176.219.000	217.684.400	203.767.400	173.160.770	262.880.400	167.777.200	211.872.600	203.311.988	89,18%	95,21%	97,33%	99,78%		
Penyusunan dan Penetapan Program dan Kegiatan Bandiklatda Provinsi Lampung	243.650.100	136.713.000	192.793.400	178.499.400	149304645	211.740.000	135.259.200	187.429.600	178.115.988	86,90%	98,94%	97,22%	99,79%		
Peyelenggaraan Musrenbang SKPD	51.140.400	39.506.000	24.891.000	25.268.000	23856125	51.140.400	32.518.000	24.443.000	25.196.000	100,00%	82,31%	98,20%	99,72%		
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	10.000.000	10.000.000				10.000.000	10.000.000			100,00%	100,00%	0,00	0,00		
Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca untuk mendorong terwujudnya Masyarakat Pembelajar	10.000.000	10.000.000				10.000.000	10.000.000			100,00%	100,00%	0,00	0,00		
Program Pendidikan Kedinasan	267.394.000	102.480.000				260.926.145	83.433.699			97,58%	81,41%	0,00	0,00		

Uraian (Program)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-				Rasio antara Realisasi dan Anggaran pada Tahun ke--				Rata-rata Pertumbuhan	
	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018	Pagu	Realisasi
Peningkatan Keterampilan, Pendidikan dan Pelatihan Teknis Widyaiswara	267.394.000	102.480.000				260.926.145	83.433.699			97,58%	81,41%	0,00	0,00		
Program Monitoring dan Diklat Aparatur	150.827.000	79.000.000				130.546.000	72.785.000			86,55%	92,13%	0,00	0,00		
Monitoring dan Pembinaan Kediklatan	150.827.000	79.000.000				130.546.000	72.785.000			86,55%	92,13%	0,00	0,00		
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	58.617.000	24.600.000				55.797.500	24.570.000			95,19%	99,88%	0,00	0,00		
Peningkatan Kesegaran Jasmani dan Rekreasi	58.617.000	24.600.000				55.797.500	24.570.000			95,19%	99,88%	0,00	0,00		

Kebijakan anggaran BPSDM Provinsi Lampung dari tahun 2015 hingga 2018 menunjukkan penurunan, hal ini disebabkan karena kondisi kemampuan keuangan pemerintah daerah Provinsi Lampung. Rata-rata penurunan yang dialami berkisar -12,16% untuk anggaran dan 11,64% untuk realisasi anggaran. Jika ditinjau dari rasio antara realisasi dan anggaran, pencapaian terbaik dari BPSDM Provinsi Lampung yaitu pada tahun 2016 sebesar 97,29%, sedangkan kurang baik tercapai pada tahun 2017 sebesar 90,46%. Ada beberapa faktor pendukung tercapainya rasio baik, antara lain: Terserapnya sebagian besar anggaran kegiatan sehingga kinerja anggaran sesuai dengan yang ditargetkan, Pengelolaan anggaran program dan kegiatan sesuai dengan rencana anggaran kas (RAK).

2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung

Tantangan

Tantangan yang dihadapi BPSDM Provinsi Lampung untuk meningkatkan kinerja pelayanan periode sebelumnya antara lain:

1. Peningkatan kapasitas manajemen pelayanan diklat yang unggul melalui peningkatan kualifikasi akreditasi lembaga diklat;
2. Adanya lembaga diklat provinsi lain yang berakreditasi A dan memiliki program/kegiatan diklat yang dapat diakses luas, yang diselenggarakan oleh tenaga kediklatan yang berkompeten dilengkapi sarana prasarana yang memadai sesuai standar yang berlaku.

Peluang

Peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mencapai Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang unggul antara lain:

1. Adanya kebutuhan SDM aparatur yang berkompeten dan profesional dari Pemerintah Provinsi Lampung sebagai agen reformasi birokrasi untuk meningkatkan efektivitas pemerintah;
2. Adanya kebijakan Permendagri nomor 38 tahun 2018 yang mengatur tentang pengalokasian anggaran pengembangan kompetensi sebanyak 0,34% dari total APBD Provinsi, sehingga potensi pengembangan kompetensi SDM aparatur Provinsi Lampung semakin banyak;
3. Kementerian/instansi pembina diklat yang bersedia memberikan dukungan dan fasilitasi dalam upaya peningkatan kapasitas manajemen penyelenggaraan diklat untuk mewujudkan SDM aparatur yang profesional seperti LAN RI, BPSDM Kemendagri, dan lembaga lainnya.

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, masih terdapat persoalan yang belum maksimal tertangani oleh BPSDM Provinsi Lampung. Beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi antara lain sebagai berikut:

1. Pemenuhan kebutuhan SDM aparatur Provinsi Lampung yang kompeten relatif rendah

Dari **16.646** orang SDM aparatur non guru di Provinsi Lampung, baru **1.274** orang yang mengikuti pengembangan kompetensi atau sekitar **7,65%**. Masih terdapat **15.372** orang aparatur yang belum mengikuti pengembangan kompetensi baik pengembangan kompetensi kepemimpinan dan prajabatan, teknis inti maupun teknis umum dan fungsional. Hal ini disebabkan dari sisi anggaran yang kurang mendukung.

2. Belum adanya pemetaan kebutuhan diklat aparatur Provinsi Lampung

Perencanaan diklat masih berdasarkan identifikasi kebutuhan diklat, bukan pemetaan kebutuhan diklat masing-masing aparatur yang dihasilkan dari analisis kesenjangan kompetensi dan kinerja. Salah satu faktor penyebabnya adalah belum adanya standar kompetensi jabatan aparatur untuk mengukur kesenjangan dan kompetensi yang dibutuhkan.

3. **Belum optimalnya evaluasi penyelenggaraan diklat di BPSDM Provinsi Lampung**

Evaluasi penyelenggaraan diklat lebih banyak menyorot pada pelaksanaannya saja, belum sepenuhnya sampai pada evaluasi pasca diklat. Sehingga dampak peningkatan kompetensi SDM aparatur di unit kerja tidak terukur.

4. **Sarana prasarana kediklatan yang masih terbatas**

Terbatasnya sarana prasarana kediklatan yang sesuai standar untuk mengakomodir peserta diklat dalam jumlah besar seperti asrama, ruang kelas dan peralatan belajar mengajar.

5. **Belum memadainya dan termanfaatkannya Teknologi Informatika**

BPSDM Provinsi Lampung sampai saat ini masih banyak melakukan tata kelola administrasi kediklatan secara manual, mulai dari registrasi peserta, kamar peserta dan database kediklatan lainnya. Hal ini disebabkan masih kurangnya SDM TI dan sarana yang belum memadai

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Dalam melaksanakan pembangunan Daerah Provinsi Lampung, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung Tahun 2019 - 2024, maka Visi Provinsi Lampung adalah: **“Rakyat Lampung Berjaya”(aman, berbudaya, maju dan berdayasaing, sejahtera)**

Untuk mewujudkan visi tersebut, Misi Pembangunan Provinsi Lampung yang akan dilaksanakan adalah:

1. **MISI 1** : Menciptakan kehidupan yang relegius (agamis), berbudaya, aman, dan damai.
2. **MISI 2** : Mewujudkan “*good governance*” untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.
3. **MISI 3** : Mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan, dan kaum difabel.
4. **MISI 4** : Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah.
5. **MISI 5** : Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah pedesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan
6. **MISI 6** : Mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung adalah salah satu OPD Pemerintah Provinsi Lampung yang juga memiliki tugas dan kewajiban untuk bersama-sama SKPD lainnya mewujudkan misi Provinsi Lampung terutama pada Misi 2 (dua) yaitu: **“Mewujudkan “good governance” untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik”**. Dengan agenda kerja yang akan diwujudkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung terpilih adalah: **Mereformasi birokrasi untuk meningkatkan efektivitas pemerintah dengan menciptakan sistem kerja berbasis kinerja dan kompetensi**.

Misi ke-2 (dua) merupakan upaya untuk mendukung meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik yang dilakukan dengan: Membenahi dan meningkatkan kualitas birokrasi Pemerintah Daerah melalui manajemen Pegawai Negeri Sipil dalam upaya mewujudkan ASN yang profesional dalam pembangunan dan pelayanan publik. Semangat reformasi birokrasi dengan 3 (tiga) pilar utama yaitu penataan organisasi,

penyempurnaan proses bisnis serta peningkatan disiplin dan manajemen SDM perlu dilakukan secara menyeluruh agar tercipta **birokrasi** pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Permasalahan-permasalahan pelayanan BPSDM Provinsi Lampung dan faktor-faktor yang terkait secara langsung terhadap pencapaian Visi, Misi dan agenda kerja Gubernur Lampung dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDM) Provinsi Lampung Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Janji Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur

VISI : Rakyat Lampung Berjaya				
No.	Misi dan Program Kepala Daerah	Permasalahan Pelayanan BPSDM	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Misi 2: Mewujudkan “good governance” untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik. Agenda Kerja: - Mereformasi birokrasi untuk meningkatkan efektivitas pemerintah dengan menciptakan sistem kerja berbasis kinerja dan kompetensi - Pembangunan SDM Aparatur dan non aparatur sebagai	- Belum terpenuhinya kebutuhan pengembangan kompetensi SDM aparatur untuk meningkatkan pelayanan publik - Belum memadainya kualitas SDM dan sarana prasarana kediklatan	- Terbatasnya anggaran menyebabkan belum seluruhnya PNS Provinsi Lampung dapat mengikuti pengembangan kompetensi (dari 9.337 PNS, baru 1274 orang yang mengikuti pengembangan kompetensi) - Anggaran peningkatan sarana dan prasana yang terbatas - Prioritas diklat yang ditetapkan belum sepenuhnya sesuai pemetaan kebutuhan diklat aparatur	- Banyaknya potensi PNS Provinsi Lampung yang dapat dikembangkan kompetensinya - Adanya kebijakan Permendagri nomor 38 tahun 2018 dan 33 tahun 2019, dimana pemerintah daerah mengalokasikan anggaran pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara pemerintah

VISI : Rakyat Lampung Berjaya				
No.	Misi dan Program Kepala Daerah	Permasalahan Pelayanan BPSDM	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	human capital pada bidang Tata kelola pemerintahan, pariwisata, pertanian/kehutanan, pendidikan, ekonomi kerakyatan dan sebagainya		- Masih banyak job description yang tidak sesuai kompetensi	daerah sekurang-kurangnya 0,34% dari total belanja daerah APBD Pemerintah Provinsi

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota

Visi Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI untuk 5 (lima) tahun mendatang adalah: ***“Sebagai institusi Pembelajaran yang Mampu Menjadi Penggerak dan Mitra Strategis dalam Mewujudkan Pemerintahan Berkelas Dunia Tahun 2024”***.

Adapun sasaran jangka menengah Renstra Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI adalah:

1. Meningkatnya kualitas hasil kebijakan
2. Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme ASN
3. Meningkatnya pengembangan dan praktek inovasi di bidang administrasi negara
4. Terwujudnya pengembangan dan penerapan ilmu administrasi negara
5. Terwujudnya peningkatan kelembagaan, tata laksana, dan SDM aparatur LAN yang profesional, serta akuntabilitas lembaga

Secara spesifik tugas dan fungsi BPSDM Provinsi Lampung terkait langsung dengan pencapaian sasaran kedua dari Renstra Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI yaitu : **Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme ASN**. Sedangkan sasaran

jangka menengah Renstra BPSDM Kementerian Dalam Negeri adalah: **Terlaksananya reformasi diklat aparatur di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.**

Dengan memperhatikan sasaran-sasaran jangka menengah renstra K/L tersebut di atas, maka Permasalahan-permasalahan pelayanan BPSDM Provinsi Lampung dan faktor-faktor yang terkait secara langsung terhadap pencapaian sasaran jangka menengah Renstra Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI dan Renstra BPSDM Kementerian Dalam Negeri dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDM) Provinsi Lampung Terhadap Pencapaian Sasaran Jangka Menengah Renstra Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI dan Renstra BPSDM Kementerian Dalam Negeri

No.	Sasaran Jangka Menengah	Permasalahan Pelayanan BPSDM Provinsi Lampung	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Renstra LAN RI - Meningkatnya kompetensi dan profesionalisme ASN	- Terbatasnya kemampuan anggaran pengembangan kompetensi SDM aparatur di BPSDM Provinsi Lampung	- Kemampuan Keuangan Daerah yang kurang mendukung - Prioritas diklat yang ditetapkan belum sepenuhnya sesuai pemetaan kebutuhan diklat aparatur	- Adanya kebijakan Permendagri nomor 39 tahun 2018 dan 33 tahun 2019 yang mengatur tentang pengalokasian anggaran pengembangan kompetensi sebanyak 0,34% dari total APBD Provinsi

No.	Sasaran Jangka Menengah	Permasalahan Pelayanan BPSDM Provinsi Lampung	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
2.	Renstra BPSDM Kemendagri - Terlaksananya reformasi diklat aparatur di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah	- Terbatasnya kualitas SDM, stakeholder kediklatan dan sarana prasarana pendukung	- SDM dan sarana prasarana yang kurang memadai	- Kementerian/ instansi pembina diklat mendorong dan memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan reformasi diklat aparatur

Telaahan terhadap Renstra Kabupaten/Kota yang menangani diklat belum dapat dilakukan, karena sebagian besar kabupaten/kota belum selesai menyusun renstra.

3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan hasil telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Terpilih serta Renstra K/L, maka dapat isu-isu strategis BPSDM Provinsi Lampung sebagai berikut:

1. **Terciptanya sistem kerja berbasis kinerja dan kompetensi untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan.**

Untuk melahirkan aparatur yang profesional perlu ditingkatkan kompetensinya, kreativitas, inovasi dan sikap perilakunya melalui diklat/pengembangan kompetensi dan BPSDM Provinsi Lampung bertugas untuk mewujudkan itu.

2. **Tingkat kepatuhan terhadap Permendagri nomor 38 tahun 2018 dan 33 tahun 2019 masih rendah.**

Ketentuan pengalokasian anggaran pengembangan kompetensi dan uji kompetensi sebanyak 0,34% dari total APBD Provinsi belum terpenuhi, dari ketentuan tersebut baru 0,07% yang teranggarkan dalam APBD BPSDM Provinsi Lampung TA 2019.

3. **Agenda kerja/Janji kerja Gubernur/Wagub terkait Pembangunan SDM Aparatur dan non aparatur sebagai *human capital* dalam pelaksanaan roda pembangunan diantaranya pada bidang Tata kelola pemerintahan, pariwisata, pertanian/kehutanan, pendidikan, ekonomi kerakyatan, pemerintahan desa.**

Untuk mendukung *common goal* pemerintah Provinsi Lampung di atas, jenis-jenis diklat yang akan diselenggarakan BPSDM seyogyanya dapat mengakomodir bidang urusan tersebut dengan tetap memperhatikan prioritas kebutuhan.

4. **Peningkatan Daya Saing BPSDM Provinsi Lampung**

Sebagai upaya BPSDM menjadi unggul dengan fokus kepada penguatan kelembagaan, perbaikan sistem penyelenggaraan dan prosedur serta kualitas tenaga penyelenggara/widyaiswara.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung

Dalam rangka mewujudkan dan menjalankan Visi dan Misi Gubernur Terpilih Provinsi Lampung periode 2019-2024, terutama pencapaian Misi Kedua yaitu “Mewujudkan *“good governance”* untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik, ditetapkan tujuan dan sasaran RPJMD sebagai berikut:

Tujuan 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik”.

Indikator tujuan : Nilai Reformasi Birokrasi (Angka)

Sasaran 3.1.1 : Meningkatnya kualitas implementasi reformasi birokrasi

Indikator Sasaran : Nilai Reformasi Birokrasi
(Angka)

Sasaran 3.1.2 : Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja

Indikator Sasaran : Opini BPK / WTP

Indikator Sasaran : Nilai SAKIP

Sasaran 3.1.3 : Meningkatnya kualitas layanan kepada masyarakat

Indikator Sasaran: Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Secara spesifik, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung memiliki tanggung jawab terkait pencapaian tujuan 3 dan sasaran 3.1.1 pada Misi 2 tersebut di

atas. Maka ditetapkan Tujuan BPSDM Provinsi Lampung yaitu :
“Terwujudnya Pengelolaan Pengembangan Kompetensi Aparatur
yang efektif “. Secara rinci tujuan dan sasaran jangka menengah
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi
Lampung tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel. 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Kondisi Awal (tahun 2018)	TARGET KINERJA					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024
Terwujudnya Pengelolaan Pengembangan Kompetensi Aparatur yang efektif	Persentase Aparatur yang Memiliki Sertifikat Diklat	Meningkatnya kompetensi SDM aparatur	Persentase Aparatur yang Memiliki Sertifikat Diklat	7,65%	12,54%	20,28%	29,34%	39,09%	48,84%	59,07%
	Nilai Akreditasi	Meningkatnya kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan diklat	Nilai Akreditasi	B	B	B	B	A	A	A

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah cara untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Strategi merupakan bagian terpenting dalam proses perencanaan stratejik karena strategi memuat rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya mewujudkan tujuan dan sasaran dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya organisasi dan keadaan lingkungan yang dihadapi. Adapun Kebijakan adalah upaya mencapai tujuan, sasaran, dan strategi, yang selanjutnya akan menjadi landasan dalam merumuskan arah pelaksanaan program.

Secara garis besar tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan BPSDM Provinsi Lampung selama 5 tahun (2020 – 2024) dapat dilihat pada Tabel 5.1 dibawah ini:

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : “Rakyat Lampung Berjaya” (aman, berbudaya, maju dan berdayasaing, sejahtera)			
Misi: “Mewujudkan “good governance” untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi	1. Sasaran 1.1 Meningkatnya kompetensi SDM aparatur	1. Strategi 1.1 Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur manajerial, teknis inti serta teknis umum dan fungsional	1. Arah Kebijakan 1.1 Pengembangan Kompetensi Manajerial bagi pejabat eselon, CPNS, Pimpinan Daerah dan Pimpinan Tinggi 2. Arah Kebijakan 1.2 Pengembangan Kompetensi inti jabatan administrasi pelayanan dasar dan pilihan, pelayanan non dasar dan urusan penunjang 3. Arah Kebijakan 1.3 Pengembangan Kompetensi Umum, Pilihan jabatan administrasi dan jabatan fungsional
	2. Sasaran 1.2 Meningkatnya kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan diklat	1. Strategi 2.1 Pembinaan, Pengembangan dan Pengelolaan Kelembagaan	1. Arah Kebijakan 2.1 Uji kompetensi dan peningkatan kapasitas asesor 2. Arah Kebijakan 2.2 Melaksanakan diklat Toc, MoT dan ToF bagi tenaga penyelenggara dan tenaga manajemen pengembangan kompetensi serta widyaiswara BPSDM Provinsi Lampung 3. Arah Kebijakan 2.3 Arah Kebijakan 2.4 Meningkatkan sarana dan prasarana kediklatan sesuai standar yang berlaku

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata sistematis dan terpadu yang merupakan penjabaran lebih rinci tentang langkah-langkah yang diambil oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung untuk menjabarkan kebijakan yang telah ditetapkan pimpinan dalam mencapai tujuan, dan sasaran organisasi.

Sedangkan **Kegiatan** merupakan tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung yang termuat dalam Renstra periode tahun 2020 – 2024 bersumber dari APBD murni Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung dan setoran diklat pemerintah kabupaten/kota. Alokasi penganggaran program dan kegiatan khususnya program dan kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran dan indikator kinerja utama organisasi berpedoman kepada peraturan yang berlaku.

Adapun Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung 2020 – 2024 disajikan dalam lampiran Tabel 6.1.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung secara spesifik memiliki tanggung jawab terkait dengan pencapaian Misi Kedua yaitu “Mewujudkan *"good governance"* untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik, dimana prioritas utama adalah Meningkatnya kualitas Reformasi Birokrasi, yang ditunjukkan dengan meningkatnya nilai reformasi birokrasi yang dicapai Pemerintah Provinsi Lampung sebagai indikatornya. Secara operasional, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung mengacu pada strategi dan arah kebijakan Pemerintah Provinsi Lampung dalam rangka mendukung peningkatan kualitas reformasi birokrasi, melalui penataan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur agar lebih profesional sesuai tugas dan fungsinya untuk memberikan pelayanan yang terbaik (prima) kepada masyarakat.

Untuk itu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung dalam jangka 5 (lima) tahun kedepan berupaya membangun kompetensi sumber daya aparatur Pemerintah Provinsi Lampung yang profesional melalui pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi aparatur. Disamping itu untuk mendukung kualitas alumni diklat yang dihasilkan, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung juga berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan dan penyelenggaraan diklat/pengembangan kompetensi yang dilakukan. Kedua hal tersebut menjadi indikator kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung selama 5 (lima) tahun kedepan.

Secara rinci penetapan indikator kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung tahun 2020 – 2024 disajikan dalam tabel sebagai berikut:

TABEL 7.3 INDIKATOR KINERJA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI LAMPUNG YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD (2018)	Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD (2024)
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Persentase Aparatur yang Memiliki Sertifikat Diklat	7,65%	12,54%	20,28%	29,34%	39,09%	48,84%	59,07%	59,07%
2.	Nilai Akreditasi	B	B	B	B	A	A	A	A

BAB VIII. PENUTUP

Rencana Strategis ini adalah dokumen perencanaan urusan pemerintah fungsi penunjang untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan dalam kerangka mewujudkan Visi dan Misi Daerah Provinsi Lampung yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2020-2024.

Sasaran, Program dan Kegiatan pembangunan dalam Renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Provinsi Lampung.

Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama bahwa adalah bahwa Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung. Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung serta digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Provinsi Lampung. Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan

dan/atau target kinerja sasaran Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung.

Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun dalam Laporan Kinerja (LkjIP) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung. Laporan Kinerja (LkjIP) itu akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung dimasa yang akan datang.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung ini.

Hajimena,

2019

**KEPALA BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH
PROVINSI LAMPUNG**



HI. KHERLANI, SE, MM

Pembina Utama

NIP. 19620504 198103 1004

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Lampung

TUJUAN	SASARAN		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
						2020		2021		2022		2023		2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH				
						TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.			
1	2		6		7	8														
1 Terwujudnya Pengelolaan Pengembangan Kompetensi Aparatur Yang Efektif	1 Meningkatkan kompetensi SDM aparatur	Persentase Aparatur yang Memiliki Sertifikat Diklat	I	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Manajerial	Persentase aparatur yang lulus pengembangan kompetensi Manajerial dengan predikat memuaskan	85,26%	100%	5.419.336.000	100%	6.408.788.057	100%	7.081.684.747	100%	8.016.261.626	100%	8.866.149.261	100%	35.792.219.691	BPSDM	Hajimena
			1	Pengembangan Kompetensi Kepemimpinan dan Prajabatan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	365 Orang	280 Orang	4.659.120.000	430 Orang	5.616.160.000	525 Orang	6.217.120.000	525 Orang	7.093.355.000	605 Orang	7.911.320.000	2365 Orang	31.497.075.000	BPSDM	Hajimena
			2	Pengembangan Kompetensi Jabatan Pimpinan Daerah	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	-	110 Orang	500.000.000	120 Orang	515.000.000	120 Orang	540.000.000	120 Orang	565.000.000	120 Orang	580.000.000	590 Orang	2.700.000.000	BPSDM	Hajimena
			3	Pengembangan Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	-	58 Orang	260.216.000	58 Orang	277.628.057	58 Orang	324.564.747	58 Orang	357.906.626	58 Orang	374.829.261	290 Orang	1.595.144.691	BPSDM	Hajimena
			II	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Teknis Inti	Persentase aparatur yang lulus pengembangan kompetensi Teknis Inti dengan hasil post test minimal 70	85,26%	100%	1.380.000.000	100%	1.631.957.775	100%	1.803.306.706	100%	2.041.290.860	100%	2.257.709.428	100%	9.114.264.769	BPSDM	Hajimena
			1	Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Pelayanan Dasar dan Pilihan	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	30 Orang	120 Orang	460.000.000	120 Orang	543.000.000	120 Orang	600.000.000	120 Orang	680.430.286	120 Orang	752.827.520	600 Orang	3.036.257.806	BPSDM	Hajimena
			2	Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Non Pelayanan Dasar	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	30 Orang	120 Orang	460.000.000	120 Orang	543.000.000	120 Orang	603.306.706	120 Orang	680.000.000	120 Orang	752.569.809	600 Orang	3.038.876.515	BPSDM	Hajimena
			3	Pengembangan Kompetensi Inti Jabatan Administrasi Urusan Penunjang	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	120 Orang	120 Orang	460.000.000	120 Orang	545.957.775	120 Orang	600.000.000	120 Orang	680.860.574	120 Orang	752.312.099	600 Orang	3.039.130.448	BPSDM	Hajimena
			III	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Teknis Umum dan Fungsional	Persentase aparatur dan non aparatur yang lulus pengembangan kompetensi Teknis Umum dan Fungsional dengan hasil post test minimal 70	85,26%	100%	2.220.000.000	100%	2.625.327.377	100%	2.900.971.657	100%	3.283.815.731	100%	3.628.967.341	100%	14.659.082.106	BPSDM	Hajimena
			1	Pengembangan Kompetensi Umum	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	330 Orang	90 Orang	500.000.000	120 Orang	813.000.000	120 Orang	913.000.000	120 Orang	1.054.422.000	120 Orang	1.154.422.000	570 Orang	4.434.844.000	BPSDM	Hajimena
			2	Pengembangan Kompetensi Pilihan Jabatan Administrasi	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	270 Orang	120 Orang	700.000.000	120 Orang	612.327.377	120 Orang	712.327.377	120 Orang	853.749.451	120 Orang	998.901.061	600 Orang	3.877.305.266	BPSDM	Hajimena
			3	Pengembangan Kompetensi Jabatan Fungsional	Jumlah Peserta yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	214 Orang	270 Orang	1.020.000.000	300 Orang	1.200.000.000	320 Orang	1.275.644.280	320 Orang	1.375.644.280	320 Orang	1.475.644.280	1530 Orang	6.346.932.840	BPSDM	Hajimena
	2 Meningkatkan kualitas pengelolaa	Nilai Akreditasi	1	Pembinaan, pengembangan dan Pengelolaan Kelembagaan	Persentase pemenuhan penyelenggaraan diklat sesuai standar	80%	100%	507.960.000	100%	600.702.370	100%	663.773.677	100%	751.372.540	100%	831.033.392	100%	3.354.841.978	BPSDM	Hajimena

TUJUAN	SASARAN		PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
						2020		2021		2022		2023		2024		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA PERANGKAT DAERAH			
						TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.		
1	2		6		7	8													
	n dan penyelenggaraan diklat		1 Uji Kompetensi dan peningkatan kapasitas asesor	Jumlah peserta uji kompetensi dan peningkatan asesor	-	100 orang	278.244.800	100 orang	295.650.000	100 orang	326.693.250	100 orang	369.816.759	100 orang	409.017.335	500 Orang	1.679.422.144	BPSDM	Hajimena
			2 Pengelolaan kelembagaan dan peningkatan kapasitas WI	Jumlah pelaksanaan KPMD, akreditasi dan karya ilmiah WI	15 Kali	13 Kali	144.931.200	15 Kali	184.485.600	18 Kali	203.856.588	22 Kali	230.765.658	25 Kali	255.226.817	93 Kali	1.019.265.863	BPSDM	Hajimena
			3 Kerjasama dan penyediaan sumber belajar	Jumlah dokumen kerjasama, buletin dan pembelajaran	1433 Buah	320 Buah	84.784.000	400 Buah	120.566.770	450 Buah	133.223.839	470 Buah	150.790.123	500 Buah	166.789.239	2140 Buah	656.153.971	BPSDM	Hajimena
			1 Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase Layanan Administrasi Perkantoran	100	100%	2.669.090.700	100%	3.428.738.197	100%	3.788.755.708	100%	4.288.871.461	100%	4.743.491.836	100%	18.918.947.903	BPSDM	Hajimena
			1 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Layanan komunikasi, sumber daya air dan listrik	48 Bulan	100%	675.803.200	100%	776.968.200	100%	858.549.861	100%	971.878.443	100%	1.074.897.558	100%	4.358.097.261	BPSDM	Hajimena
			2 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Layanan administrasi keuangan	48 Bulan	100%	404.158.800	100%	759.229.200	100%	838.948.266	100%	949.689.437	100%	1.050.356.517	100%	4.002.382.221	BPSDM	Hajimena
			3 Penyediaan jasa kebersihan kantor	Layanan Kebersihan Kantor	48 Bulan	100%	186.450.000	100%	220.495.770	100%	243.647.826	100%	275.809.339	100%	305.045.129	100%	1.231.448.063	BPSDM	Hajimena
			4 Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah Pengadaan ATK kantor	48 Bulan	1969 Buah	30.524.800	2264 Buah	35.478.000	2604 Buah	39.203.190	2995 Buah	44.378.011	3444 Buah	49.082.080	13276 Buah	198.666.081	BPSDM	Hajimena
			5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	48 Bulan	78866 Lembar	39.195.500	90696 Lembar	47.304.000	104300 Lembar	52.270.920	119945 Lembar	59.170.681	137937 Lembar	65.442.774	531744 Lembar	263.383.875	BPSDM	Hajimena
			6 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	48 Bulan	2067 Unit	64.310.000	2377 Unit	76.053.006	2734 Unit	84.038.572	3144 Unit	95.131.663	3616 Unit	105.215.619	14538 Unit	424.748.860	BPSDM	Hajimena
			7 Penyediaan peralatan rumah tangga dan peralatan listrik	Jumlah Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Listrik	48 Bulan	1733 Buah	148.830.400	1993 Buah	175.949.593	2292 Buah	194.424.300	2636 Buah	220.088.308	3031 Buah	243.417.669	11685 Buah	982.710.271	BPSDM	Hajimena
			8 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	48 Bulan	5550 Buku	81.000.000	5550 Buku	70.956.000	5575 Buku	78.406.380	5600 Buku	88.756.022	5600 Buku	98.164.161	27875 Buku	417.282.563	BPSDM	Hajimena
			9 Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah Layanan Makan dan Minum	48 Bulan	58 Kali	69.780.000	67 Kali	82.521.828	77 Kali	91.186.620	89 Kali	103.223.254	102 Kali	114.164.919	393 Kali	460.876.620	BPSDM	Hajimena
			10 Rapat - Rapat Koordinasi dan konsultasi	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi	266 Kali	100 Kali	618.038.000	106 Kali	768.690.000	124 Kali	849.402.450	110 Kali	961.523.573	116 Kali	1.063.445.072	556 Kali	4.261.099.096	BPSDM	Hajimena
			11 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran	Jumlah Tenaga PTHL	-	15 Orang	351.000.000	15 Orang	415.092.600	15 Orang	458.677.323	15 Orang	519.222.730	15 Orang	574.260.339	75 Orang	2.318.252.992	BPSDM	Hajimena
			II Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase Tingkat Ketersediaan Sarpras Kantor	70%	100%	1.555.600.700	100%	1.661.830.911	100%	1.836.323.157	100%	2.078.717.813	100%	2.299.061.902	100%	9.431.534.483	BPSDM	Hajimena
			1 Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	461 Unit	225 Unit	1.046.819.700	246 Unit	1.118.286.664	271 Unit	1.235.706.764	298 Unit	1.398.820.057	328 Unit	1.547.094.983	1368 Unit	6.346.728.168	BPSDM	Hajimena
			2 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	46 Bulan	37 Unit	234.800.000	41 Unit	219.727.080	45 Unit	242.798.423	50 Unit	274.847.815	55 Unit	303.981.684	228 Unit	1.276.155.002	BPSDM	Hajimena
			3 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	48 Bulan	6 Unit	149.631.000	6 Unit	176.760.857	6 Unit	195.320.747	6 Unit	221.103.085	6 Unit	244.540.012	30 Unit	987.355.701	BPSDM	Hajimena
			4 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	45 Bulan	252 Unit	124.350.000	277 Unit	147.056.310	305 Unit	162.497.223	336 Unit	183.946.856	370 Unit	203.445.223	1540 Unit	821.295.611	BPSDM	Hajimena

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	SATUAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										
						2020		2021		2022		2023		2024		
						TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	TARGET	RP.	
						-										
		4	Pengembangan e-Government Peringkat Daerah dan Publikasi Pendongkiran	Implementasi aplikasi e-Government dan pemrosesan	1	Paket	2	320.000.000	2	317.041.000	2	372.445.305	2	421.571.105	2	446.279.762
		5	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan Pengeluaran Asset	Jumlah Dokumen Rencana Kebutuhan Barang dan Pengeluaran Asset	-	Dokumen	50	20.065.600	55	24.814.600	61	27.442.231	67	31.064.600	74	34.357.650
					Jumlah		15.000.000.000		17.798.795.229		19.651.318.611		22.238.331.381		24.587.582.633	

